

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Pernyataan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Gambar	
Daftar Tabel	
Daftar Publikasi dan Keikutsertaan dalam Konferensi selama Penelitian	
<i>Abstract</i>	
Intisari	

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1 Latar Belakang Masalah	15
1.1.1 Konsep <i>Public Service Bargains</i> Pada Hubungan Eksekutif dan Legislatif	15
1.1.2 Politik Anggaran dalam Proses Penganggaran Daerah	19
1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah	25
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	27
1.4 Fokus Riset dan Dasar Pemikiran Penelitian	28
1.4.1 Aspek Perilaku : Perilaku Aktor dalam Penentuan Kebijakan Anggaran	28
1.4.2 Aspek Kekuasaan : Kewenangan dan Kepemimpinan	29
1.4.3 Aspek Interaksi : Pola Kerja Sama, Persuasif dan Pengarahan	30
BAB II KERANGKA TEORI	32
2.1 Sejarah <i>Public Service Bargains</i>	32
2.2 Konsep PSB	32
2.2.1 Tipologi PSB	35
2.2.2 Komponen PSB	38
2.3 Komponen PSB Perkembangan <i>Public Service Bargains</i> di Berbagai Negara	40
2.4 Aktor-aktor Kebijakan Publik	46
2.5 Teori yang Relevan Dengan <i>Public Service Bargains</i>	48

2.5.1	Teori <i>Principal Agent</i>	48
2.5.2	Teori <i>Power and Politics Organization</i>	50
2.6	Kerangka Konseptual Penelitian	52
2.7	Proses Kebijakan Publik	54
2.8	Kebijakan Penganggaran pada Pemerintah Daerah	58
2.8.1	Proses Penganggaran	58
2.8.2	Dasar Penganggaran pada APBD Pemerintah Daerah	59
2.8.3	Siklus Penganggaran pada APBD	60
2.8.4	Penyusunan APBD pada Pemerintah Daerah	61
BAB III	METODOLOGI	72
3.1	Pendekatan Penelitian	72
3.1.1	Penelitian Kualitatif	72
3.1.2	Pendekatan Studi Kasus	74
3.1.3	Fokus Penelitian, Pilihan Kasus, Unit Analisis	75
3.2	Pengumpulan Data	75
3.2.1	Informasi dan Jenis Data Penelitian	75
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	77
3.3	Informan dan Analisis Data	80
3.4	Teknik Pengecekan Validitas Data	92
BAB IV	PSB KEPEMIMPINAN FAHRIYANTO (2000-2010) : DOMINASI	
	LEGISLATIF DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN ANGGARAN	94
4.1	Pengantar	94
4.2	Profil dan Kronologis Kasus :	95
4.2.1	Kegiatan Klaim Asuransi Fiktif (2002-2004) : Kesepakatan Pelaksanaan APBD Digunakan Di Luar Ketentuan	96
4.2.2	Kegiatan Pengadaan Buku Ajar (2003) : Kesepakatan Anggaran Berdasarkan Usulan Penyedia Jasa	99
4.3	PSB dalam Penentuan Kebijakan Anggaran : Kesepakatan Semu antara Legislatif dan Eksekutif	102
4.3.1	<i>Bargaining</i> : Kesepakatan Semu dalam Penentuan Kebijakan Anggaran	103
4.3.2	Komponen PSB dalam Penentuan Kebijakan Anggaran	107
4.3.2.1	<i>Reward</i> : Hubungan yang Kondusif Antara	107

Eksekutif dan Legislatif

4.3.2.2 *Competency* : Eksekutif Sebagai Fasilitator

Legislatif 109

4.3.2.3 *Loyalty: Partner Bargains* Eksekutif dan Legislatif 112

4.4	Aspek Interaksi : Interaksi Eksekutif dan Legislatif dalam Penentuan Kebijakan Anggaran	114
4.5	Aspek Perilaku : Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penentuan Kebijakan Anggaran	117
4.6	Aspek Kekuasaan : Dominasi Legislatif terhadap Eksekutif	121
4.7	PSB Kepemimpinan Fahriyanto pada Penentuan Kebijakan Anggaran	123
4.8	Penutup	128

BAB V PSB KEPEMIMPINAN SIGIT WIDYONINDITO (2010-2021)

:DOMINANSI EKSEKUTIF DALAM KEMITRAAN

DENGAN LEGISLATIF 130

5.1	Pengantar	131
5.2	Profil dan Kronologis Kasus :	131
5.2.1	Kegiatan Penataan Aloon-Aloon (2017): Badan Anggaran Menyepakati Alokasi Anggaran Yang Tidak Disepakati Oleh Komisi	131
5.2.2	Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Kota (2019) : Kegiatan di luar KUA-PPAS	134
5.3	PSB dalam Penentuan Kebijakan Anggaran : Mencapai Kesepakatan dari berbagai Kepentingan	136
5.3.1	<i>Bargaining</i> : PSB Dalam Mencapai Kesepakatan Formal dan Informal	136
5.3.2	Komponen PSB dalam Penentuan Kebijakan Anggaran	139
5.3.2.1	<i>Reward</i> : Penghargaan atas Prestasi Eksekutif	139
5.3.2.2	<i>Competency</i> : Kemampuan Eksekutif Dalam Berkomunikasi Informal Dengan Legislatif	141
5.3.2.3	<i>Loyalty</i> : Tingkat Otonomi Pengambilan Keputusan Eksekutif dibandingkan Legislatif	142

5.4	Aspek Interaksi : Aktor Eksekutif dan Legislatif dalam Penentuan Kebijakan Anggaran	144
5.5	Aspek Perilaku : Perilaku Politik Legislatif dan Eksekutif dalam Pengambilan Keputusan	150
5.6	Aspek Kekuasaan : Pelaksanaan Fungsi Anggaran Legislatif	157
5.7	PSB Kepemimpinan Sigit Widyonindito pada Penentuan Kebijakan Anggaran	161
5.8	Penutup	165
BAB VI KESIMPULAN		167
6.1	Pengantar	167
6.2	Temuan Penelitian dan Pertanyaan Penelitian	167
6.2.1	<i>Public Service Bargains</i> di Pemerintah Daerah	167
6.2.2	Aspek Pembentuk Komponen <i>Public Service Bargains</i>	168
6.2.3	Komparasi Aspek dan Komponen PSB pada Kepemimpinan Fahriyanto (2000-2010) dan Kepemimpinan Sigit Widyonindito (2010-2021)	171
6.2.4	Implikasi Teoritis	173
	6.2.4.1 Teori Prinsipal Agen	174
	6.2.4.2 Teori <i>Power and Politics Organization</i>	176
6.3	Implikasi, Kebijakan, Limitasi, Kontribusi dan Penelitian Selanjutnya	179
6.3.1	Implikasi Kebijakan	179
6.3.2	Keterbatasan Penelitian	181
6.3.3	Kontribusi Penelitian	181
6.3.4	Tantangan Penelitian selanjutnya	182
DAFTAR PUSTAKA		184
LAMPIRAN-LAMPIRAN		193